



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-5
Pos Metro	

Tanggal																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Bulan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Penyidik Periksa Kalaksa BPBD

PADANG - SINGGALANG

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar telah memeriksa Kalaksa dan Bendahara BPBD Sumbar selama tujuh jam terkait dugaan penyelewengan anggaran Covid-19.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan keduanya telah datang ke Mapolda pada Senin (15/3) dan diperiksa sekitar tujuh jam. "Total ada 33 pertanyaan yang dilemparkan penyidik kepada keduanya," katanya, Rabu (17/3).

Sesampai di Mapolda Sum-

bar keduanya langsung datang ke ruang penyidik Subdit Tipidkor Direskrimsus untuk dimintai keterangan terkait penggunaan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.

Selain itu pihaknya juga meminta sejumlah dokumen yang dimiliki oleh BPBD Sumbar terkait pembelian alat yang bersangkutan dengan penggunaan anggaran Covid-19. "Proses pengumpulan barang bukti dan keterangan terus dilakukan terhadap kasus ini," lanjut Satake.

Sebelumnya Polda Sumbar telah meminta keterangan dari dua pejabat terkait dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 dari dana realokasi anggaran APBD 2020. Kedua pejabat yang dimintai keterangan itu yakni Kabid Rehabilitasi BPBD Sumbar Suryadi

dan anggota DPRD Sumbar Nofrizon.

"Kita mengumpulkan keterangan terlebih dahulu untuk mengungkap kasus ini," kata Kabid Humas.

Sementara Kasubdit Tipidkor Polda Sumbar, Kompol Agung B mengatakan pihaknya mengumpulkan sejumlah dokumen dari BPBD Sumbar dan masih menunggu dokumen berupa notulen pansus tidak lanjut temuan LHP BPK terkait anggaran Covid-19. "Kita sudah surati Sekwan DPRD Sumbar untuk meminta dokumen tersebut dan masih kita tunggu," kata dia.

Ia mengatakan dalam menghadapi kasus ini pihaknya ingin mengurut satu per satu mulai dari dokumen, keterangan saksi dan ahli mulai dari ahli pidana hingga ahli Tipidkor. "Kita juga melibatkan pihak eksternal dan

dalam setiap tahapan proses akan selalu kita lakukan gelar perkara," kata dia.

Terkait dengan adanya informasi pihak BPBD telah mengembalikan kerugian negara pihaknya tentu membutuhkan bukti pengembalian tersebut. "Jika telah mengembalikan kita minta bukti pengembalian dan melakukan evaluasi melibatkan ahli pidana dan ahli Tipidkor. Kita gelar perkara lagi apa perbuatan ini tercukupi atau tidak tindak pidana korupsi," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan terus bekerja mengungkap persoalan ini apalagi kasus ini mendapat perhatian serius Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto. "Kita akan proses secepatnya dalam mengungkap persoalan ini," tuturnya lagi. (109)